

7-12-2022

## Hubungan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat terhadap Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Kab./Kota Tahun 2015-2019

Wawan Fahrudin

*Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, wawanfahrudin@gmail.com*

Hera Susanti

*Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia, hera.cpt27b@gmail.com*

Follow this and additional works at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke>



Part of the [Economics Commons](#), [Public Affairs, Public Policy and Public Administration Commons](#), and the [Urban Studies and Planning Commons](#)

---

### Recommended Citation

Fahrudin, Wawan and Susanti, Hera (2022) "Hubungan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat terhadap Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Kab./Kota Tahun 2015-2019," *Jurnal Kebijakan Ekonomi*: Vol. 17: Iss. 2, Article 5.

DOI: 10.21002/jke.2022.09

Available at: <https://scholarhub.ui.ac.id/jke/vol17/iss2/5>

This Article is brought to you for free and open access by the Faculty of Economics & Business at UI Scholars Hub. It has been accepted for inclusion in Jurnal Kebijakan Ekonomi by an authorized editor of UI Scholars Hub.

---

## Hubungan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat terhadap Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Kab./Kota Tahun 2015-2019

### Cover Page Footnote

Sektor formal yang dimaksud adalah pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja berbadan hukum, sedangkan sektor informal adalah pekerja migran yang bekerja pada pemberi kerja perseorangan.

## Hubungan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat terhadap Jumlah Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten/Kota Tahun 2015- 2019

Wawan Fahrudin<sup>a\*</sup>, & Hera Susanti<sup>b</sup>

<sup>a</sup> Program Studi Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan,  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

<sup>b</sup> Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia

### Abstract

*The level of welfare in the district/city affects the number of migrant workers. The government has 2 policy options, when viewing PMI delivery as a manifestation of poverty, it must focus on reducing poverty in PMI enclaves through work-intensive programs, increasing per capita and Long-School Expectations, in districts with high populations, especially in Java, and the area is not large. The policy started at least 2 years earlier. If the government views PMI as an asset, the policy focus is focused on districts with high poverty rates, low Long-School Expectations, high population, in Java with a narrow area.*

**Keywords:** Migrant workers, Gross Regional Domestic Product-GDP, Human Development Index-HDI, poverty, unemployment, Regency/City.

### Abstrak

Tingkat kesejahteraan di kabupaten/kota berpengaruh pada jumlah pekerja migran. Pemerintah memiliki 2 pilihan kebijakan, apabila memandang pengiriman PMI manifestasi ketidaksejahteraan/kemiskinan, harus fokus pada penanggulangan kemiskinan di daerah kantong PMI melalui program padat karya, peningkatan PDRB per kapita dan Harapan Lama Sekolah (HLS), di kabupaten dengan populasi tinggi, terutama di Jawa, dan luas wilayah tidak besar. Kebijakan sekurang-kurangnya dimulai 2 tahun sebelumnya. Apabila pemerintah memandang PMI sebagai aset, fokus kebijakan dipusatkan pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi, HLS rendah, populasi tinggi, di Jawa dengan luas wilayah sempit.

**Kata kunci:** Pekerja migran, Produk Domestik Regional Bruto-PDRB, Indeks Pembangunan Manusia-IPM, kemiskinan, pengangguran, Kabupaten/Kota.

### PENDAHULUAN

Pekerja migran telah memainkan peran penting di pasar tenaga kerja Indonesia sejak awal 1980an. Terjadinya surplus penawaran tenaga kerja di dalam negeri membuat pemerintah Indonesia mengirimkan pekerja migran (saat itu disebut TKI-Tenaga Kerja

Indonesia) dalam jumlah cukup besar ke negara-negara yang memerlukan. Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam merupakan beberapa negara di Asia Tenggara yang mengalami pembangunan yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, negara-negara di Timur Tengah seperti Arab Saudi, Kuwait, Bahrain dan Qatar juga

---

\* alamat korespondensi :Jl. MT Haryono Kav 52, Jakarta. Email : wawanfahrudin@gmail.com

membuka diri bagi pekerja asing di sektor informal. Di negara-negara tersebutlah kemudian menjadi orientasi pengiriman para pekerja migran asal Indonesia.

Lonjakan pekerja migran berimigrasi ke luar negeri, terutama Arab Saudi, disebabkan besarnya kesempatan kerja bagi tenaga kerja asing di bidang jasa personal pada sektor informal, karena peningkatan kesejahteraan penduduk Saudi akibat harga minyak yang naik tajam di akhir tahun 1970an dan awal 1980an, sehingga mengalihfungsikan tugas rumah tangga (*International Organization for Migration* (IOM, 2010)). Bukan hanya di Saudi, gelombang tujuan migrasi para pekerja migran Indonesia juga terjadi di Malaysia. Seiring dengan permintaan tenaga kerja segmen sekunder di luar negeri, dan sektor industri di dalam negeri yang belum mampu menyerap luapan angkatan kerja menyebabkan pengangguran dan memicu migrasi ke luar negeri sebagai alternatif mengurangi pengangguran.

Indonesia sebagai salah satu pemasok calon pekerja migran terbesar maka menjadi fenomena yang patut dikaji secara akademis, untuk menelaah lebih dalam faktor-faktor yang mendorong daerah-daerah melakukan migrasi internasional, sehingga daerah tersebut dikenal sebagai kantong pekerja migran. Oleh karena itu, studi ini bermaksud menganalisis berbagai faktor yang secara makro mempengaruhi jumlah pekerja migran di tiap-tiap kabupaten/kota pada tahun 2019, dengan pertanyaan lanjutan, mengapa sebuah daerah jumlah pekerjanya sedikit dibandingkan daerah lainnya pada tahun 2019? Menurut penulis studi ini penting untuk digunakan sebagai referensi akademis

penyusunan kebijakan perlindungan migran dan mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah kantong pekerja migran.

## TINJAUAN LITERATUR

### Tinjauan Teoritis

#### Migrasi Internasional

Teori *social capital-network* mengemukakan bahwa jaringan migran merupakan salah satu pembentuk modal sosial (*social capital*), yaitu nilai atau sumber daya yang tumbuh pada individu atau kelompok dengan membentuk hubungan sosial yang baik dan tahan lama (Loury, 1977; Coleman, 1990; Buordieu dan Wacquant, 1992 dalam Massey & Espinosa, 1997). Sedangkan teori *dual labor market* menggarisbawahi bahwa terjadinya inflasi struktural, problem motivasional, dualisme ekonomi, dan karakteristik dari penawaran tenaga kerja memicu terjadinya migrasi internasional. Pekerja migran yang dibutuhkan di negara industri modern secara umum harus memenuhi kriteria tertentu, diantaranya mampu bekerja dengan gaji rendah, kondisi yang tidak stabil, dan tantangan berkaitan dengan dunia modern. Massey et. al. (1993) menyebutkan bahwa kriteria tersebut secara umum dapat dipenuhi oleh individu dengan karakteristik demografis tertentu, diantaranya perempuan dan mereka yang berusia muda.

#### Penawaran Tenaga Kerja

Penawaran tenaga kerja dapat dipengaruhi beberapa faktor yaitu: 1) Jumlah penduduk, apabila suatu negara memiliki jumlah penduduk yang besar, maka akan menghasilkan jumlah tenaga kerja yang tinggi dari sisi angkatan kerja maupun bukan angkatan kerja; 2) Keberagaman umur

penduduk, dengan meningkatnya umur panjang penduduk menjadi salah satu capaian yang diperoleh masyarakat yang dapat dilihat dari sisi peningkatan kesehatan dan kesejahteraan; 3) Produktivitas, penduduk yang memiliki produktivitas tinggi menunjukkan hubungan antara *output* dan jam kerja yang dibutuhkan sehingga dapat menghasilkan produk yang berkualitas.

### **Permintaan Tenaga Kerja**

Miller & Meiners (1993), berpendapat bahwa permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh nilai marjinal produk (*Value of Marginal Product*, VMP). Nilai marjinal produk (VMP) merupakan perkalian antara Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product*, MPP) dengan harga produk yang bersangkutan. Produk Fisik Marginal (*Marginal Physical Product*, MPP) adalah kenaikan total produk fisik yang bersumber dari penambahan satu unit input variabel (tenaga kerja).

### **Pengangguran**

Menurut BPS, pengangguran adalah istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari pekerjaan, bekerja kurang dari dua hari selama satu minggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan. Pengangguran merupakan suatu keadaan dimana seorang yang tergolong angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan namun belum memperolehnya. Sedangkan orang yang tidak bekerja dan tidak aktif mencari pekerjaan maka digolongkan sebagai penganggur yang dapat menurunkan kualitas hidup dari orang tersebut (Baeti, 2013). Menurut Sumarsono (2009) pengangguran merupakan persentase jumlah penduduk yang menganggur terhadap jumlah angkatan kerja. Pada dasarnya, pengangguran disebabkan

karena terjadinya kelebihan penawaran tenaga kerja dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja pada pasar tenaga kerja. Tingkat pengangguran terbuka dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

### **Kemiskinan**

Kemiskinan merupakan masalah dalam pembangunan yang ditandai oleh tingkat pengangguran, keterbelakangan, serta disusul oleh ketimpangan. Selain itu, kemiskinan juga ditentukan oleh arus migrasi di dalamnya. Penduduk yang rata-rata pengeluaran perkapita perbulannya di bawah garis kemiskinan maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.

### **Pendapatan**

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut BPS merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan seluruh unit usaha dalam suatu wilayah atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Bilamana PDRB dibagi dengan jumlah penduduk di wilayah tertentu, disebut dengan PDRB Perkapita. PDRB Perkapita mencerminkan kondisi kesejahteraan masyarakat di sisi ekonomi (Dewi, 2017).

### **Tinjauan Empiris**

Beberapa penelitian tentang determinan migrasi internasional diantaranya penelitian Syafitri (2012) di daerah pedesaan Malang yang menemukan adanya hubungan positif pada latar belakang pendidikan, jenis kelamin, dan umur terhadap keputusan bermigrasi ke luar negeri. Gipson dan McKenzie (2011) mencoba menganalisis determinan migrasi di tingkat mikro dengan menggunakan studi kasus di 3 negara Pasifik. Pada kasus Filipina, Agbola dan Acupan (2010) mencoba meneliti

faktor-faktor sosial ekonomi dengan mengacu pada teori migrasi Borjas yang melihat migrasi sebagai akibat dari ledakan populasi suatu negara, perbedaan pendapatan antarnegara, kondisi politik, dan kebijakan imigrasi yang berlaku. Hasilnya, kepadatan penduduk, pendapatan per kapita, keaksaraan orang dewasa, ketidakstabilan politik, dan tingkat pengangguran secara signifikan berpengaruh terhadap migrasi.

Variabel pendapatan per kapita, keaksaraan orang dewasa, dan ketidakstabilan politik bernilai negatif. Pendapatan per kapita konsisten dengan argumen sebelumnya bahwa ekonomi yang tumbuh dapat mencegah migrasi keluar. Keaksaraan orang dewasa bahkan signifikan secara 5%. Artinya, arus migrasi sangat sensitif terhadap tingkat melek huruf orang dewasa. Upaya pencegahan emigrasi dapat dilakukan melalui pengembangan sumber daya manusia (Agbola dan Acupan, 2010).

Dengan menggunakan tiga variabel yaitu tingkat pendidikan, biaya migrasi, dan perbandingan upah di kedua negara menemukan tenaga kerja yang berpendidikan tinggi akan cenderung bermigrasi untuk mendapatkan imbalan yang tinggi (seleksi positif). Michaelides (2011) melakukan penelitian tentang dampak ikatan lokal, upah, dan biaya perumahan terhadap keputusan bermigrasi. Penelitian ini digunakan untuk melihat bagaimana efek jaringan dan karakteristik lokasi sosial yang diinginkan dalam upaya pencegahan migrasi di daerah metropolitan AS. Hasil empiris menunjukkan bahwa upah dan perbedaan biaya perumahan antardaerah metropolitan cenderung meningkatkan migrasi. Efek dari jaringan

sosial yang kuat dan karakteristik lokasi yang diinginkan terhadap keputusan migrasi individu lebih penting daripada efek perbedaan upah atau biaya perumahan antara negara asal dan negara tujuan.

Meskipun banyak analisis migrasi yang mengaitkan dengan teori neoklasik, seiring perkembangannya banyak teori baru bermunculan yang melihat aliran migrasi tidak hanya karena perbedaan pendapatan antarnegara, melainkan sebagai konsekuensi globalisasi di dunia. Titan, dkk (2012) mencoba membandingkan kedua teori tersebut, apakah migrasi terjadi sebagai efek dari globalisasi ataukah kondisi kemiskinan suatu negara. Dengan menggunakan *Principal Components Analysis*, komponen dibedakan menjadi dua, yaitu standar hidup sosial dan eksklusif dan komponen globalisasi. Penelitian ini menemukan korelasi lebih kuat dari komponen globalisasi dibandingkan standar hidup. Di masa depan, akan sangat mungkin komponen standar hidup akan berkorelasi kuat dengan migrasi. Apalagi untuk negara-negara maju, standar hidup yang lebih tinggi akan menyebabkan arus masuk migrasi dari negara dengan standar hidup rendah.

Penelitian Rachmadi (2010) menyatakan bahwa terdapat faktor ekonomi dan non ekonomi yang dapat memicu tenaga kerja Indonesia untuk melakukan migrasi internasional dengan memasukkan lima negara tujuan migrasi melalui model gravitasi. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa variabel PDB per kapita dan pengangguran di negara asal tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah arus migrasi. Sementara itu, variabel PDB per kapita negara tujuan, jarak antar negara asal ke negara tujuan

berpengaruh secara parsial terhadap arus migrasi tenaga kerja Indonesia. Variabel-variabel bebas dalam persamaan secara simultan berpengaruh terhadap jumlah arus migrasi tenaga kerja Indonesia. Sementara itu penelitian Puspitasari (2016) bertujuan untuk menganalisis pengaruh jumlah pengangguran, PDRB per kapita, lama seseorang menempuh pendidikan, dan jumlah penduduk miskin terhadap migrasi tenaga kerja ke luar pada tahun 2010 hingga 2014. Hasil analisis menyimpulkan bahwa variabel jumlah pengangguran, PDRB per kapita, rata-rata lama seseorang menempuh pendidikan, dan jumlah penduduk miskin secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya, jumlah pengangguran dan jumlah penduduk miskin secara parsial berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja ke luar negeri. Variabel rata-rata lama pendidikan dan PDRB per kapita secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi.

Umumnya migrasi disebabkan oleh keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik, baik dari sisi ekonomi, sosial dan lainnya. Todaro (2008) menganalisis bahwa pendapatan yang diharapkan (*expected income*) menjadi penyebab terjadinya migran nonpermanen akibat perbedaan pendapatan antara daerah (negara) asal dengan daerah (negara) tujuan. Menurut Todaro, para migran membandingkan pasar tenaga kerja yang tersedia bagi mereka di daerah asal dan daerah tujuan, kemudian memilih salah satu yang dianggap mempunyai keuntungan maksimum yang diharapkan (*expected gains*).

Mita Adhisti (2014) mengutip beberapa studi, Lee, 1966 dan Kumar dan Shidu, 2005,

bahwa migrasi didasari oleh faktor pendorong dan faktor penarik. Kedua faktor ini tidak lepas dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, politik, budaya maupun ekonomi suatu wilayah. Faktor pendorong migrasi sebagian besar terdapat pada negara berkembang dilihat dari karakteristik kondisi perekonomian yang belum stabil. Lain halnya dengan faktor penarik migrasi yang dimiliki oleh negara maju dengan kondisi perekonomian yang mapan dan relatif stabil.

## METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif melalui analisis regresi nonlinier Binomial Negatif. Unit analisis sebanyak 505 Kab./Kota dengan variabel Y adalah jumlah pekerja migran dan variabel X meliputi: (1) Tingkat Kemiskinan (dalam jumlah dalam angka); (2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); (3) Rata-Rata Lama Sekolah-*Means Years of Schooling* (MYS); (4) Harapan Lama Sekolah-*Expected Years of Schooling* (EYS); (5) Pekerjaan yang diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); (6) Kesejahteraan dengan mengukur pengeluaran dan pendapatan per kapita kabupaten/kota.

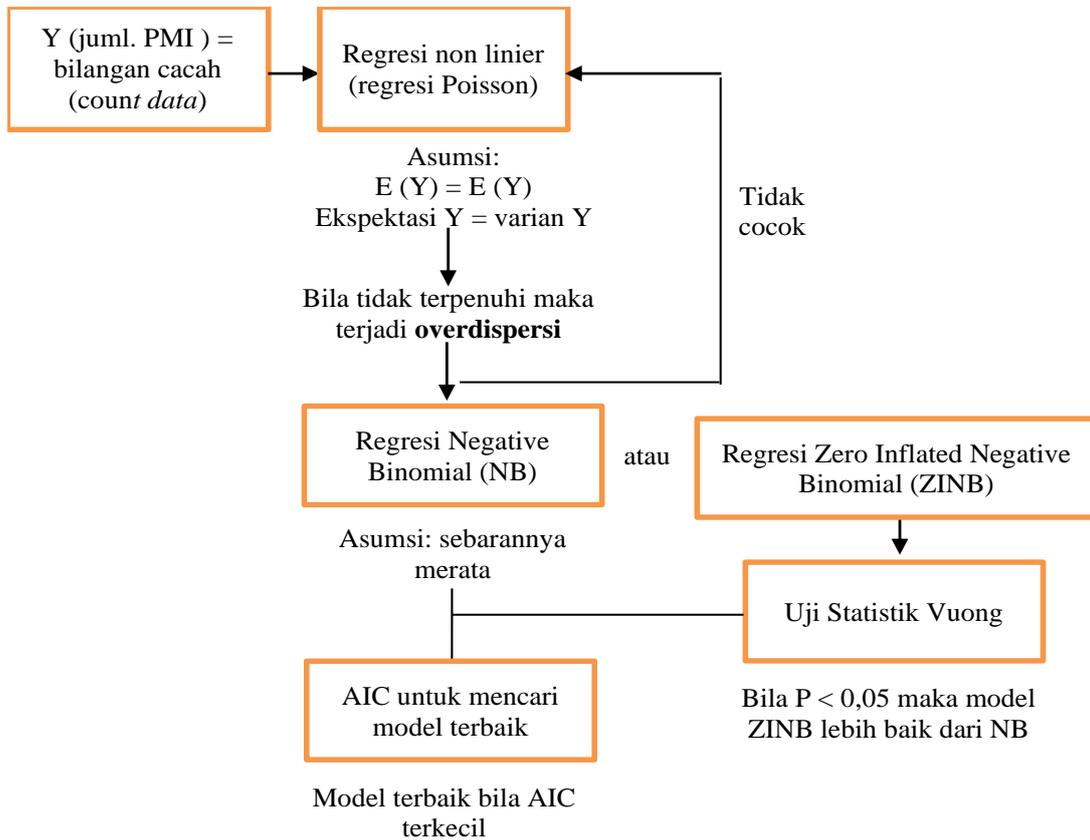
Semula dalam penelitian ini akan menggunakan regresi linier berganda dengan asumsi ditimbang dengan jumlah penduduk menjadi variabel kontinu, namun ketika mencari model Y seperti itu syarat regresi linier berganda tidak terpenuhi, yakni tidak memenuhi uji normalitas, tidak lolos uji heterokedasitas, tidak lolos uji autokorelasi karena variabel Y tidak normal yang disebabkan sebaran data Y-nya tidak normal karena banyak kabupaten/kota yang jumlah

PMI-nya 0 atau tidak mengirimkan PMI, sehingga bila ditarik kurva menjadi tidak normal dan asumsi normalitas terlanggar, serta tipe datanya tidak dapat menggunakan tipe kontinu. Dengan tipe data seperti

H<sub>1</sub> : data tidak berdistribusi Poisson  
 Taraf signifikansi 5%.

Regresi Poisson mensyaratkan variabel Y bilangan cacah (0, 1, 2, 3...dst), dan variabel X-nya kategoris, misalnya (ya dan tidak), (miskin

**Metode Regresi Nonlinier Binomial Negatif dan Regresi Inflated Negative Binomial**



tersebut, maka beberapa referensi yang memungkinkan kasus overdispersi, dua di antaranya adalah regresi binomial negatif dan regresi Poisson.

Asumsi dan syarat dalam regresi Poisson diantaranya adalah variabel U berdistribusi Poisson dan terjadi *uquidisperso*. E(Y) - V(Y) dari data didapatkan hasil bahwa data tidak berdistribusi Poisson dan terjadi overdispersi E(Y) < V(Y). Hasil sebagai berikut:

Uji Distribusi Data Poisson (K-5 Test)

Hipotesis

Ho : data berdistribusi Poisson

dan tidak miskin) atau dapat juga bilangan kontinu. Apabila variabel X-nya adalah bilangan kontinu, maka akan kesulitan menginterpretasikan. Oleh karena itu, untuk variabel kontinu, semisal pendapatan (PDRB perkapita) akan dibuat bukan dalam bentuk variabel kontinu, namun dalam bentuk satuan ratusan atau ribuan untuk memudahkan interpretasi.

Regresi Poisson berasal dari distribusi Poisson yang mengasumsikan rata-rata dan varian sama E (Y) = V (Y). Rata-rata adalah ekspektasi dari variabel Y harus sama dengan varian Y. Untuk data jumlah PMI, asumsi

tersebut juga terlanggar, setelah diuji dengan regresi Poisson, varian jauh lebih besar daripada rata-ratanya (overdispersi). Artinya, varian tidak sama dengan rata-ratanya, sehingga tidak disarankan menggunakan regresi Poisson. Sehingga untuk kondisi data yang overdispersi solusinya menggunakan model regresi negatif binomial. Namun karena distribusi  $Y = 0$  distribustrinya tidak merata maka menggunakan *mix model zero Inflated*. Artinya, data respon atau data variabel  $Y$  yang banyak 0-nya dan  $Y$  bilangan cacah maka dapat menggunakan model zero inflated negative binomial (ZINB) selain model binomial negatif.

## HASIL

### Interpretasi Hasil Olah Data Menggunakan Model Binomial Negatif

Kondisi: Setelah variabel didrop

#### Metode: Zero-inflated Negative Binomial

| Variabel Yang Digunakan        | Variabel Yang Tidak Digunakan |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Jumlah penduduk miskin (ribu)* | IKK                           |
| IPM*                           | % penduduk miskin             |
| EYS*                           | Penduduk berdasar kemiskinan  |
| MYS*                           | $P_1$                         |
| TPT*                           | $P_2$                         |
| PDRB perkapita ADHB (juta)*    | Pengeluaran                   |

Keterangan: \*signifikan di taraf 5%

Interpretasi dilakukan dengan mengeksponensialkan angka coef dari output. Ketika nilai  $\exp(\text{coef})$  bernilai  $<1$  kali lipat, maka interpretasi dapat dibalik untuk memudahkan dengan menghitung  $1/\exp(\text{coef})$ .

Model terbagi menjadi 2 bagian: *Pertama*, negative binomial part (bagian atas). *Kedua*, zero inflated part (bagian bawah). Variabel bertanda bintang signifikan pada taraf uji 5%.

Dari jumlah observasi data (*number of obs.*) semula dari jumlah kabupaten/kota sebanyak

yang diinput sebanyak 514 kabupaten/kota sesuai dengan jumlah yang terdaftar di Kementerian Dalam Negeri, namun disebabkan sejumlah kabupaten//kota yang datanya tidak lengkap (missing) yakni: 1) Mamuju Tengah; 2) Buton Tengah; 3) Buton Selatan; 4) Muna Barat; 5) Siau Tagulandang Biaro; 6) Kota Baru; dan 7) Mempawah. Oleh karena itu, data kabupaten/kota yang dianalisa sebanyak 505 kabupaten/kota.

Model regresi Binomial Negatif menjelaskan bahwa terdapat sebanyak 383 kabupaten/kota (nonzero obs.) yang mengirimkan PMI, dan sebanyak 122 kabupaten/kota tidak memiliki PMI atau tidak mengirimkan PMI sama sekali ke luar negeri (zero obs.). Likelihood Ratio (Rsquare) sebesar 274,59 (uji simultan). Artinya, secara probalita Pvalue-nya 0,000, yang dapat dimaknai bahwa model regresi Binomial Negatif sudah layak untuk

digunakan.

Untuk tabel regresi dibagi menjadi 2 bagian (part), yakni table bagian atas merupakan part regresi NB dan yang di bagian bawah part regresi ZINB. Untuk model NB ke-enam variabel (jumlah kemiskinan, IPM, EYS, MYS, TPT dan Income Perkapita) berpengaruh signifikan karena  $\alpha = 5\%$ . Dibandingkan dengan menggunakan model regresi Zero Inflated Negative Binomial (ZINB), variabel yang signifikan hanya 3 variabel yaitu: jumlah penduduk miskin, MYS, dan TPT.

Young test untuk membuktikan ZINB dengan standard negative binomial.

H<sub>0</sub> : model regresi ZINB tidak memperbaiki model NB

H<sub>1</sub> : model regresi ZINB memperbaiki model NB

P<sub>value</sub>nya di bawah 0,05 artinya model NB lebih baik daripada model ZINB. Bila dilihat dari olahdata tersebut maka model regresi ZINB lebih tepat digunakan karena Pr<sub>z</sub> = 0,0122 (lebih kecil dari 0,05).

0,02471 dan eksponen koefisien bernilai 1,025. Hal tersebut dapat dimaknai bahwa untuk setiap peningkatan 1000 orang penduduk miskin, akan meningkatkan jumlah PMI sebanyak 1,025 kali orang dengan mengasumsikan variabel lain konstan. Jadi, kemiskinan memiliki korelasi kuat dengan penambahan jumlah PMI di kabupaten/kota di Indonesia. Hal ini memberikan keyakinan bahwa faktor pendorong seseorang menjadi PMI disebabkan oleh kemiskinan di daerah

**Determinan Jumlah Penduduk Miskin dengan Jumlah Pekerja Migran di Kabupaten Kota**

| Variabel                | coef    | Exp(coef) | Interpretasi  |
|-------------------------|---------|-----------|---|
| Jumlah Penduduk Miskin* | 0.02471 | 1.025018  | Untuk setiap peningkatan 1000 orang penduduk miskin, akan meningkatkan jumlah PMI 1.025 kali, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. |

Keterangan: Data interpretasi jumlah penduduk miskin pada model regresi Negatif Binomial

Korelasi jumlah penduduk miskin dengan jumlah PMI di kabupaten/kota dari hasil regresi BN didapatkan data nilai koefisien

asal. IPM memiliki hubungan positif dengan penambahan jumlah pekerja migran, dimana

**Determinan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan Jumlah Pekerja Migran di Kabupaten Kota**

| Variabel | coef | Exp(coef) | Interpretasi |
|----------|------|-----------|--------------|
|----------|------|-----------|--------------|

**Determinan Pendidikan dengan Jumlah Pekerja Migran di Kabupaten Kota**

| Variabel | coef     | Exp(coef) | Interpretasi   |
|----------|----------|-----------|--|
| EYS*     | -0.29851 | 0.741923  | Untuk setiap peningkatan 1 tahun harapan lama sekolah, akan terjadi perubahan jumlah PMI sebesar 0.74 kali (menurun), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.<br>Atau<br>Untuk setiap penurunan 1 tahun HLS, akan meningkatkan jumlah PMI sebesar 1.34 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. |

Keterangan: Data interpretasi EYS pada model regresi Negatif Binomial

| Variabel | coef     | Exp(coef) | Interpretasi   |
|----------|----------|-----------|--|
| MYS*     | -0.54051 | 0.582452  | Untuk setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah, akan terjadi perubahan jumlah PMI sebesar 0.58 kali (menurun), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.<br>Atau<br>Untuk setiap penurunan 1 tahun RLS/MYS, akan meningkatkan jumlah PMI sebesar 1.71 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. |

Keterangan: Data interpretasi MYS pada model regresi Negatif Binomial

untuk setiap peningkatan 1 point IPM, akan meningkatkan jumlah pekerja migran sebesar 1,25 kali, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. Hal ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin baik nilai IPM sebuah daerah, maka akan meningkatkan jumlah pekerja migran di daerah-daerah tersebut. Dalam konteks ini, memang secara fakta pekerja migran banyak bekerja di sektor-sektor informal *low skill level*, namun demikian tidak menutup kemungkinan bahwa dorongan upah/gaji yang lebih tinggi akan mendorong para pekerja migran untuk lebih memilih bekerja ke luar negeri, karena selisih gaji dan kurs dari mata uang negara penempatan.

Para pekerja migran asal Indonesia secara umum memiliki latar belakang pendidikan yang masih relatif rendah karena masih didominasi oleh lulusan pendidikan menengah pertama dan sekolah atas, yang bila ditotal maka mencapai 72% dari tota pendidikan pekerja migran. Akibatnya, profesi yang dijalankan para pekerja migran lebih banyak bekerja pada sektor informal seperti pekerja rumah tangga, perawat rumah tangga, operator produksi, bekerja di rumah makan.

Untuk variabel EYS hubungannya negatif. Data tersebut dapat dimaknai untuk setiap

0,74 kali (menurun), dengan mengasumsikan variabel lain konstan atau dengan kata lain untuk setiap penurunan 1 tahun HLS, akan meningkatkan jumlah PMI sebesar 1,34 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. Koefisien juga EYS yang negatif (0,2985) artinya bila dalam kabupaten/kota penduduknya menurun tingkat sekolahnya maka akan menaikkan jumlah PMI di daerah tersebut. Data yang sama dari EYS juga sejalan dengan data MYS (rata-rata lama sekolah) dimana untuk setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah, akan terjadi perubahan jumlah PMI sebesar 0,58 kali (menurun), dengan mengasumsikan variabel lain konstan, atau setiap penurunan 1 tahun RLS/MYS, akan meningkatkan jumlah PMI sebesar 1,71 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. Jadi, tingkat pendidikan berkorelasi negatif dengan jumlah PMI, dimana makin tinggi angka pendidikan maka minat untuk menjadi PMI akan semakin berkurang. Sebetulnya ada 2 faktor lain yang mempengaruhi IPM yakni AHH dan pengeluaran per kapita. Namun yang memiliki korelasi kuat dengan menggunakan model regresi Binomial Negatif hanya EYS dan MYS.

**Determinan Pengangguran dengan Jumlah Pekerja Migran di Kabupaten Kota**

| Variabel | coef     | Exp(coef) | Interpretasi  |
|----------|----------|-----------|---|
| TPT*     | -0.12413 | 0.883264  | <p>Untuk setiap peningkatan 1 persen TPT, maka akan terjadi perubahan jumlah PMI sebesar 0.86 kali (menurun), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.</p> <p>Atau</p> <p>Untuk setiap penurunan 1 persen TPT akan menaikkan jumlah PMI sebesar 1.13 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan.</p> |

Keterangan: Data interpretasi TPT pada model regresi Negatif Binomial

peningkatan 1 tahun harapan lama sekolah, akan terjadi perubahan jumlah PMI sebesar

Dari hasil olah data menggunakan regresi Binomial Negatif didapatkan bahwa Tingkat

Pengangguran Terbuka (TPT) bernilai negatif, dimana setiap penurunan tingkat pengangguran terbuka akan setiap peningkatan 1 persen TPT, maka akan terjadi

persen TPT akan menaikkan jumlah PMI sebesar 1,13 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. Jadi, ketika TPT kecil maka jumlah PMI bertambah,

**Determinan PDRB dengan Jumlah Pekerja Migran di Kabupaten Kota**

| Variabel             | coef     | Exp(coef) | Interpretasi   |
|----------------------|----------|-----------|--|
| PDRB perkapita ADHB* | -0.00322 | 0.996782  | Untuk setiap peningkatan 1 juta rupiah PDRB perkapita ADHB, akan terjadi perubahan jumlah PMI sebesar 0.9967 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan.<br>Atau<br>Untuk setiap penurunan 1 juta PRDB perkapita akan menaikkan jumlah PMI sebesar 1.003 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. |

Keterangan: Data interpretasi PDRB pada model regresi Negatif Binomial

perubahan jumlah PMI sebesar 0,86 kali (menurun), dengan mengasumsikan variabel lain konstan, atau untuk setiap penurunan 1

karena terbukanya peluang kerja di dalam negeri namun karena alasan upah maka orang memutuskan untuk menjadi pekerja migran

**Analisis Menggunakan Model Zero Inflated Binomial (ZINB)**

| Variabel                | coef    | Exp(coef) | Interpretasi  |
|-------------------------|---------|-----------|---|
| Jumlah Penduduk Miskin* | -0.1163 | 0.8902    | Setiap peningkatan 1000 penduduk miskin akan menurunkan <b>kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI</b> (jumlah PMI tidak 0) 0.8902 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI 0), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.<br>Atau<br>Setiap penurunan 1000 penduduk miskin akan menaikkan <b>kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI</b> (jumlah PMI tidak 0) 1.12 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI 0), dengan mengasumsikan variabel lain konstan. |
| IPM                     | -0.4028 | 0.6684    |   |
| EYS                     | 0.2062  | 1.2290    |   |
| MYS*                    | 2.2236  | 9.2401    | Setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan meningkatkan <b>kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI</b> (jumlah PMI tidak 0) 9.24 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI 0), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.   |
| TPT*                    | 0.3211  | 1.3787    | Setiap peningkatan 1 persen TPT akan meningkatkan <b>kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI</b> (jumlah PMI tidak 0) 1.38 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI 0), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.   |

Keterangan: Data interpretasi pada model regresi Zero Inflated Negatif Binomial

daripada bekerja di dalam negeri. Dapat juga dipahami bahwa kesempatan pekerjaan untuk tenaga kerja yang tidak terdidik kesempatan di dalam negeri lebih sedikit maka orang cenderung memutuskan untuk menjadi pekerja migran.

Untuk setiap peningkatan 1 juta rupiah PDRB perkapita ADHB, akan terjadi perubahan jumlah PMI sebesar 0,9967 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan atau untuk setiap penurunan 1 juta PRDB perkapita akan menaikkan jumlah PMI sebesar 1,003 kali lipat, dengan

rendah. Hal tersebut dikarenakan penduduk sudah sejahtera sehingga mereka tidak perlu mencari solusi untuk menambah pendapatan, sehingga ketika PDRB perkapita tinggi, maka tidak berpengaruh signifikan terhadap migrasi tenaga kerja ke luar Indonesia. Sesuai dengan Hukum Okun yang menjelaskan hubungan negatif antara output dan tingkat pengangguran, peningkatan pada output akan menghasilkan penurunan pada pengangguran dengan asumsi bahwa angkatan kerja adalah konstan. Okun menyimpulkan bahwa tanpa adanya

|                                |         |        |   |
|--------------------------------|---------|--------|---|
|                                | -0.1163 | 0.8902 | <p><i>Setiap peningkatan 1000 penduduk miskin akan menurunkan kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI (jumlah PMI tidak 0) 0.8902 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI 0), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.</i></p> <p style="text-align: center;"><i>Atau</i></p> <p><i>Setiap penurunan 1000 penduduk miskin akan menaikkan kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI (jumlah PMI tidak 0) 1.12 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI 0), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.</i></p> |
| <i>Jumlah Penduduk Miskin*</i> |         |        |   |

Keterangan: Data interpretasi Jumlah Penduduk Miskin pada regresi Zero Inflated Negatif Binomial

mengasumsikan variabel lain konstan. Bila pendapatan per kapita masyarakat kecil maka orang akan memiliki kecenderungan untuk mencari pekerjaan yang lebih baik, salahsatunya menjadi PMI ke luar negeri dengan harapan mendapatkan upah/gaji yang lebih besar.

Ketika penduduk suatu daerah memiliki tingkat pendapatan yang tinggi maka pengiriman tenaga kerja akan semakin

pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran akan meningkat.

Untuk model analisis ZINB yang memiliki pengaruh cukup kuat hanya 3, yakni jumlah penduduk miskin, EYS dan MYS. Untuk jumlah penduduk miskin.

Dari analisis di atas dapat disebutkan bahwa dalam setiap peningkatan 1000 penduduk miskin akan menurunkan kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI (jumlah

|             |        |        |  |
|-------------|--------|--------|--|
|             | 2.2236 | 9.2401 | <p><i>Setiap peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan meningkatkan kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI (jumlah PMI tidak 0) 9.24 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI 0), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.</i></p> |
| <i>MYS*</i> |        |        |  |

Keterangan: Data interpretasi MYS pada regresi Zero Inflated Negatif Binomial

|             |               |               |   |
|-------------|---------------|---------------|---|
| <i>TPT*</i> | <i>0.3211</i> | <i>1.3787</i> | <i>Setiap peningkatan 1 persen TPT akan meningkatkan kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI (jumlah PMI tidak o) 1.38 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI o), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.</i> |
|-------------|---------------|---------------|---|

PMI tidak o) 0,8902 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI o), dengan mengasumsikan variabel lain konstan. Dengan kata lain, setiap penurunan 1000 penduduk miskin akan menaikkan kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI (jumlah PMI tidak o) 1,12 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI o), dengan mengasumsikan variabel lain konstan.

Terkait dengan pengaruh MYS terhadap jumlah PMI, belum dapat dikatakan relevan dengan faktanya, karena justru peningkatan 1 tahun rata-rata lama sekolah akan cenderung meningkatkan jumlah PMI di Kab./Kota, terkecuali untuk PMI yang bekerja di sektor formal.

Setiap peningkatan 1 persen TPT akan meningkatkan kecenderungan kabupaten/kota untuk memiliki PMI (jumlah PMI tidak o) 1,38 kali lipat (dibandingkan tidak memiliki PMI/jumlah PMI o), dengan mengasumsikan variabel lain konstan. Hasil ini berlawanan dengan hasil olah data NB.

Bahwasanya berdasarkan analisis part NB dan part ZINB bahwa variabel independent yang mempengaruhi jumlah PMI lebih banyak yang berpengaruh kuat pada model NB dibandingkan model ZINB. Namun untuk PDRB per kapita pada level 10%. Artinya, signifikan di level 10%, dengan Pvalue 0, 064, namun di level 5% tidak signifikan, masih dalam penelitian masih dimungkinkan

karena  $\alpha=10\%$ . Modelnya berpengaruh di level simultan.

### KESIMPULAN

Dari hasil analisis keterkaitan variabel terikat (Y) adalah jumlah PMI, menggunakan regresi nonlinier Binomial Negatif dengan variabel yang mempengaruhi (variabel X), antara lain: 1) tingkat kemiskinan; 2) Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-Rata Lama Sekolah- *Means Years of Schooling* (MYS), Harapan Lama Sekolah-*Expected Years of Schooling-EYS*; 3) Pekerjaan, diukur melalui Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 4) Kesejahteraan dengan mengukur pengeluaran dan pendapatan per kapita Kab/Kota, maka disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: (1), Tingkat kemiskinan berkorelasi positif terhadap jumlah PMI, dengan koefisien 0,025 dan eksponen 1,025. Artinya, setiap peningkatan 1000 orang penduduk miskin, akan meningkatkan jumlah PMI 1,025 kali, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. (2), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), koefisiennya 0,22 dengan eksponen 1,25. Artinya, setiap peningkatan 1 poin IPM, akan meningkatkan jumlah PMI sebesar 1,25 kali, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. (3), EYS dan MYS sebagai komponen IPM berpengaruh negatif di angka EYS -0,298 dengan eksponen 0,74. Artinya, setiap penurunan 1 tahun HLS, akan meningkatkan jumlah PMI sebesar 1,34 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel

lain konstan. Sama halnya EYS, komponen MYS koefisiennya juga negatif pada angka 0,54 dan eksponen 0,58, yang dapat dimaknai, setiap penurunan 1 tahun RLS/MYS, akan meningkatkan jumlah PMI sebesar 1,71 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. (4), TPT juga berkorelasi negatif pada koefisien 0,124 dengan eksponen 0,88, dimana untuk setiap penurunan 1 persen TPT akan menaikkan jumlah PMI sebesar 1,13 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan. (5), PDRB perkapita juga negatif dengan koefisien  $-0,003$  dan eksponen 0,997 yang bermakna Untuk setiap penurunan 1 juta PRDB perkapita akan menaikkan jumlah PMI sebesar 1,003 kali lipat, dengan mengasumsikan variabel lain konstan.

### REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil penelitian ini akan berkontribusi bagi upaya kebijakan yang ditetapkan pemerintah dalam konteks perlindungan pekerja migran, sekaligus memberikan kontribusi untuk menyusun program-program yang sesuai berdasarkan karakteristik wilayah kantong pekerja migran. Untuk itu, saran dari hasil penelitian ini kepada pemerintah sebagai berikut: (1), secara rerata, pekerja migran memilih bekerja di luar negeri disebabkan oleh dorongan daerah asal, yang disebabkan oleh faktor kemiskinan, pengangguran dan tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karenanya, dominasi pekerja migran berjenis kelamin perempuan dan bekerja di sektor informal. Oleh karena itu, disebabkan tingkat pendidikan para migran membuat mereka tidak memiliki banyak pilihan, dan terpaksa memilih bermigrasi untuk dapat memiliki pekerjaan dan pendapatan. Diharapkan

Pemerintah dan instansi terkait dapat turut serta meningkatkan pendidikan masyarakat, yang dimulai dari sosialisasi tentang pentingnya memiliki pendidikan yang tinggi agar dapat bersaing pada lapangan pekerjaan. (2), selain penciptaan lapangan pekerjaan, salah satu program lain yang perlu dikembangkan oleh Pemerintah dan instansi terkait adalah mengadakan penyuluhan tentang pentingnya bekerja dan juga mengadakan pelatihan tenaga kerja mandiri. (3), perlunya optimalisasi akses informasi dari dinas terkait terutama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan BP2MI, mengenai ketenagakerjaan khususnya peluang kerja pada sektor pengiriman (migrasi) tenaga kerja ke dalam negeri maupun ke luar negeri. (4), pekerja migran yang sudah pernah bermigrasi dan sudah kembali ke Indonesia, diberikan penyuluhan, pembinaan, dan arahan dari Pemerintah Daerah dan instansi terkait tentang pengelolaan modal yang diperoleh dari hasil bekerja di luar negeri, agar tidak hanya dihabiskan untuk kebutuhan sehari-hari, tetapi juga digunakan untuk melakukan suatu usaha yang akan menghasilkan perputaran dari modal tersebut.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alhudhori, M. (2017). Pengaruh IPM, PDRB dan jumlah pengangguran terhadap penduduk miskin di Provinsi Jambi. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 1(1), 113–124.
- Bandiono, S. dan Alihar, F (1999). *Tinjauan Penelitian Migrasi Internasional di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Bellante, D., & Jackson, M. (1990). *Ekonomi Ketenagakerjaan*. (K. Wimandjaja & M. Yasin, Ed.). Jakarta: LPFE UI.

- Borjas, G. J. (2016). *Labor Economics* (Seventh). New York: The MacGraw-Hill Companies.
- De Haas, H. (2005). International migration, remittances and development: myths and facts. *Third World Quarterly*, 26(8), 1269-1284
- Effendi, T.N (1999). *Tinjauan Penelitian Migrasi Internasional di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Gujarati, D. (1995). *Basic Econometrics*. 3<sup>rd</sup> Edition. International Edition. Singapore: McGraw-Hill.
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2006). *Dasar-dasar ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Gunawan, C. I., & Reiza, R. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Sumber Daya Manusia: Dampak pengurangan Tenaga Kerja Migran Sektor Informal. *Referensi: Jurnal Ilmu Manajemen dan Akuntansi*, 3(1), 47-54.
- Haning Romdiati, (2012). Migrasi Tenaga Kerja Indonesia dari Kabupaten Tulungagung: Kecenderungan dan Arah Migrasi, serta Remitansi, *Jurnal Kependudukan Indonesia*, Vol. VII, No. 2,
- Hugo, G. (1992). Indonesian Labour Migration to Malaysia: Trends and Policy Implication. Kuantan: Univesiti Malaya Cawangan, Kuantan.
- Hugo, G (1995). International Labour Migration and Family: Some Observation from Indonesia. *Asia and Pacific Migration Journal*. Vol. 4, No. 2-3. p. 273-301.
- ILO dan KOMAD (2019). *Operational Manual On Recruitmen Cost – SDG 10.7.1*
- Keban, Y.T (1994). Studi Niat Bermigrasi di Tiga Kota: Determinan dan Intervensi Kebijakan. *Prisma*. No. 7, Juli 1994.
- Lee, E. (1966). A Theory of Migration” *Demography*. Vol 3, p. 47-57.
- Lee, Everett S. (1966). A Theory of Migration. *Population Association of America*, (online), 3 (1): 47-57, (<http://www.jstor.org/stable/2060063>, diakses pada 23 february 2016)
- Maddala, G.S (1992). *Introduction to Econometrics*. Second Edition. Prentice Hall.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makro Ekonomi*(Edisi ke-5). Jakarta: Erlangga
- Mantra, I.B., Kasto, Keban, Y.T (1999). Mobilitas Tenaga Kerja Indonesia ke Malaysia: Studi Kasus Flores Timur, Lombok Tengah, Pulau Bawean. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan, Universitas Gadjah Mada.
- Mantra, Ida Bagoes. (2006). *Demografi Umum*. Edisi Kedua. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Massey, D. S., & Espinosa, K. E. (1997). What's Driving Mexico-U.S. Migration? A Theoretical, Empirical, and Policy Analysis. *American Journal of Sociology*, 939-999.
- Massey, D. S., Arango, J., Hugo, G., Kouaouci, A., Pallegirino, A., & Taylor, J. E. (1993). Theories of International Migration: A Review and Appraisal. *Population and Development Review*, Vol. 19, No. 3, 431-466.
- Nasution, A.M (1997). Aliran Pekerja Indonesia ke Malaysia: Kes Tentang Pekerja Indonesia Dalam Sektor Pembinaan di Kuala Lumpur, Malaysia Tesis Doktor Falsafah, Universiti Kebangsaan Malaysia.
- Novia Dani Pramusinto, dan Akhmad Daerobi, (2019). Permintaan dan Penawaran Tenaga kerja Serta Pengangguran di Indonesia, dalam *Seminar Nasional dan Call For Paper Seminar Bisnis Magister Manajemen (SAMBIS-2019) “Membangun Ekonomi Kreatif yang Berdaya Saing*.
- Ravenstein, E.G. (1885). “The Laws of Migration, *Journal of the Royal Statistical Society*”. Vol. 48, p.167-235. *Environment*. Vol.8 (1 and 2).
- Salvatore, D. (1997). *Ekonomi Internasional*. Edisi kelima jilid 1. Erlangga. Jakarta. Hal494.
- Simmons, A.B. (1986). Recent Studies on Place-Utility and Intention to Migrate: An International Comparison. *Population and Environment*. Vol. 8 (1 and 2).
- Susilowati, I (1998). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat Tenaga Kerja

- Indonesia (TKI) Bermigrasi ke Malaysia (Studi kasus di Kawasan Selangor, Malaysia). *Majalah Penelitian Lembaga Penelitian*, UNDIP. Tahun X, No. 40, Desember 1998.
- Tjiptoherijanto, Prijono. (1997). *Migrasi, Urbanisasi dan Pasar Kerja di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Tjiptoherijanto, Prijono. (1999). *Migrasi Internasional: Proses, Sistem dan Masalah Kebijakan*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Todaro, M.P. (1986). "Perencanaan Pembangunan". Jakarta: Intermedia.
- Todaro, M.P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, diterjemahkan oleh Haris Munandar, Erlangga, Jakarta
- Wahyu Indah Puspitasari, Sri Kusreni,(2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Migrasi Tenaga kerja Ke Luar Negeri Berdasarkan Provinsi di Indonesia, *Jurnal Ilmu Ekonomi Terapan*, Juni 2017: 49-64, ISSN 2541-1470